

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Agresivitas Pajak**

Pendekatan agresif perusahaan merupakan posisi yang sangat tidak konservatif, perusahaan akan menghadapi bahaya atau resiko. Namun sebagian perusahaan bersedia untuk mengorbankan keselamatan demi mendapatkan laba yang lebih tinggi. Alasan dari diterapkannya kebijakan yang agresif adalah untuk mengambil keuntungan [16]. Defenisi pajak telah di jelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1]. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang harus dibayar sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Karena hal itu, perusahaan sering melakukan Agresivitas Pajak untuk menekan atau meminimalkan beban pajak seminimal mungkin [1].

Dalam *tax planning* ada tiga cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

Cara pertama adalah *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang [17].

Cara kedua adalah *Tax Evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal [17].

Cara ketiga adalah *Tax Saving* (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilan menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar [17]. Agresivitas Pajak mampu mengukur beban perusahaan yang adanya tindakan dari perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang bertambah untuk mengontrol pendapatan perusahaan dengan upaya akan mendapatkan laba ataupun keuntungan dari sebelum dikenakan pajak [18].

Pada penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* [18].

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \quad (2.1)$$

Keterangan :

ETR = *Effective Tax Rate*

### 2.1.2 *Return on Assets*

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan / atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Semua ini hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya [19].

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan / atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target

yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri.

Rasio profitabilitas memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan [19].

Salah satu jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets*) / ROA, yang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas [19].

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari beberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan / atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri.

Sama seperti rasio lainnya, rasio profitabilitas memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi

perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam penelitian ini untuk mengukur rasio profitabilitas menggunakan jenis rasio *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset [19].

Rasio profitabilitas diukur dengan (ROA) [19]:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.2)$$

### 2.1.3. *Leverage*

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Dana juga dibutuhkan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha atau investasi baru. Artinya di dalam perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan [8].

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang [8].

Pengukuran rasio *leverage* dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: [8].

1. Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk pemodal.
2. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi.

Ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan *leverage* yaitu:



1. Untuk mengetahui posisi perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga.
2. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak lainnya (kreditor).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengolahan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, tedapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Secara umum proksi *leverage* yang digunakan yaitu *Debt to Equity Ratio*. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio hutang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang bersal dari pemilik perusahaan, dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan [8].

Rasio ini dihitung dengan membagi total utang (utang jangka pendek dan utang jangka panjang) dengan modal pemilik perusahaan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Semakin tinggi nilai DER maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik dapat dijadikan sebagai jaminan utang akan lebih aman bagi kreditor apabila memberikan pinjaman kepada dibitor yang memiliki tingkat DER 0,5 atau 50% karena hal ini berarti bahwa akan semakin besar jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Namun ketentuan ini dapat berbeda pada setiap perusahaan tergantung tingkat rata industry perusahaan tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung *debt to equity ratio* [8]:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.3)$$

#### 2.1.4. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak Independen [21]

Sebab dengan adanya komisaris independen, akan tercipta suatu keadaan dimana pengelola perusahaan cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG seperti prinsip akuntabilitas transparansi, keadilan dan penanggung jawab serta kemandirian yang tentu saja akan mendatangkan manfaat lebih bagi perusahaan seperti :

- a. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanam/membeli saham di Indonesia.
- b. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara terutama dari hasil privatisasi [11].

Dalam menentukan jumlah atau proporsi komisaris independen, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* menetapkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris Manajemen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan.
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak diperkerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu grup usaha.
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup, atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan.

Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur

tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris [22]. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen adalah jumlah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan komisaris lainnya maupun dengan perusahaan. Sehingga dengan adanya komisaris independen diharapkan laporan keuangan perusahaan menjadi lebih berkualitas dan tidak ada kecurangan serta kinerja perusahaan semakin meningkat [23].

Secara matematis proporsi Komisaris Independen dapat dirumuskan sebagai berikut [23]:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \quad (2.4)$$

### 2.1.5. Ukuran Perusahaan

Secara umum, ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

#### 1. Perusahaan Kecil

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000

#### 2. Perusahaan Menengah

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

#### 3. Perusahaan Besar

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000.

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset penjualan, dan kapitalisasi pasar. Terdapat dua jenis pendanaan aset yang dimiliki perusahaan, yaitu melalui utang atau modal sendiri. Ukuran perusahaan melalui total aset cenderung lebih stabil daripada melalui penjualan. Hal ini disebabkan karena penjualan cenderung lebih berfluktuasi setiap tahun daripada total aset. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar merupakan nilai perusahaan yang dihitung melalui hasil kali antara jumlah lembar saham yang beredar dengan nilai pasar saham per lembar.

Perusahaan besar cenderung lebih menarik dan lebih diperhatikan oleh publik. Perusahaan besar akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan besar melakukan pengungkapan yang lebih banyak daripada perusahaan kecil, yaitu perusahaan besar lebih diperhatikan oleh investor dan perusahaan tersebut memiliki kemampuan biaya yang lebih banyak untuk pengungkapan yang lebih luas, untuk mempertahankan citra dan reputasi yang baik. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi.

Selain itu, perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber pendanaan dari eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Investor akan lebih merespon secara positif terhadap perusahaan besar sehingga akan meningkatkan nilai bagi perusahaan yang berskala besar. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan.



Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya perusahaan yang semakin besar. Sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah, kebutuhan terhadap sumber daya perusahaan juga semakin kecil. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan [22]. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan logaritma natural total aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan logaritma natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya. Adapun rumus ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini [24].

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan [24]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)} \quad (2.5)$$

Keterangan :

Ln = Logaritma Natural

### 2.1.6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan oleh institusional mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga potensi terjadinya *financial distress* dapat diminimalisir karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen [22].

Kepemilikan institusional juga dapat disebut investor institusional. Kepemilikan saham oleh investor institusional berpotensi secara optimal untuk mengawasi tindakan atau aktivitas manajemen dan memiliki *voting power* untuk mengadakan perubahan ketika manajemen sudah dianggap tidak efektif lagi dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan dalam cakupan prinsip *corporate governance* mewakili prinsip kesetaraan, dimana sebagai pemangku kepentingan berhak mendapatkan perlakuan adil dan setara dari pengelolaan.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan karena investor institusional ikut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional akan membuat manajer memfokuskan perhatian pada kinerja perusahaan, sehingga dapat mengurangi tindakan manajer yang mementingkan diri sendiri [22].

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen [25]. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka akan semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga konflik kepentingan manajemen dapat dikurangi. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur menggunakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi terhadap jumlah saham yang beredar [22].

Kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut [22]:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (2.6)$$

## 2.2. Review Peneliti Terdahulu

Adapun review dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak “. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 143 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dengan menggunakan metode pengambilan sample *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan *Capital Intensity* dan *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, serta *Inventory Intensity* dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [26].

2. Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, dan Rendika Vhalery melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “ Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak “. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan sektor manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan Ukuran Perusahaan serta Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak [6].
3. Devan Danny dan Rosidy Rahado Nurgroho melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “ Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Terhadap Agresivitas Pajak “. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan Komisaris Independen Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak [12].
4. Jeane Atari melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak “. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan sektor manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak [14].
5. Yanti Nova Lita Simorangkir, Bambang Subroto, dan Wuryan Andayan melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “ Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak “. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan sektor manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak [27].
6. Indah Budianti, Mohammad Rafki Nazar dan Kurnia melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “ Pengaruh *Return on Asset (ROA)*, *Leverage (DER)*, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak ”.

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan sektor manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan ROA, *Leverage* dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7].

**Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Capital Intensity</i> b. <i>Inventory Intensity</i> c. Profitabilitas d. <i>Leverage</i>	<u>Secara Simultan :</u> <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresvitas Pajak b. <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresvitas Pajak c. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak d. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Agresvitas Pajak
Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, dan Rendika Vhalery	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresvitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Profitabilitas	<u>Secara Simultan :</u> Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresvitas Pajak b. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresvitas Pajak
Devan danny dan Rosidy Rahado Nurgroho	Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Terhadap Agresivitas pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. Komisaris Independen b. Kompensasi	<u>Secara Simultan :</u> Komisaris Independen dan Kompensasi berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  <u>Secara Parsial:</u> a. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresvitas Pajak b. Kompensasi berpengaruh positif terhadap Agresvitas Pajak
Jeane Atari	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. Kepemilikan Manajerial b. Kepemilikan Institusional	<u>Secara Simultan :</u> Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  <u>Secara Parsial:</u> a. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan



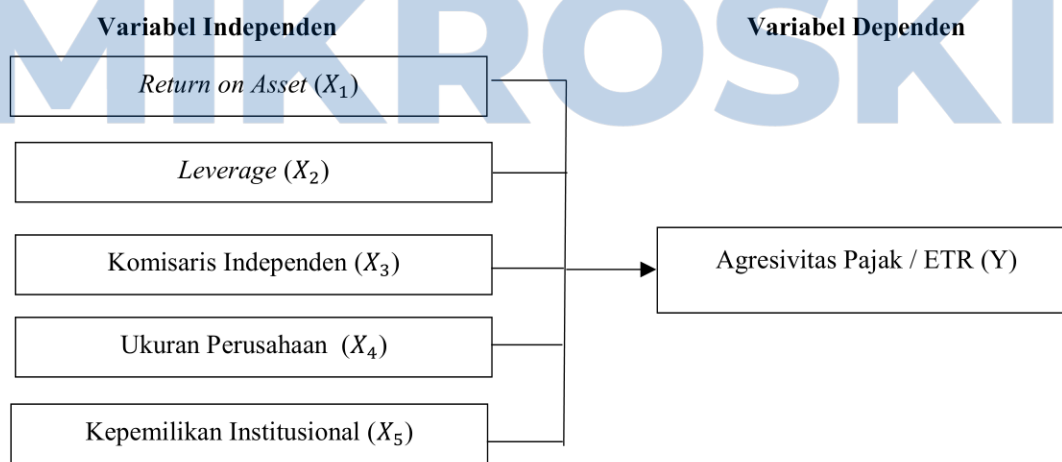
Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

**Tabel 2.1 Sambungan**

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Yanti Nova Lita Simorangkir, Bambang Subroto, dan Wuryan Andayan	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Corporate Social Responsibility</i> b. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan :</u> <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negative terhadap Agresvitas Pajak b. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresvitas Pajak
Indah Budianti, Mohammad Rafki Nazar dan Kurnia	Pengaruh <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Leverage</i> (DER), Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Return on Asset</i> (ROA) b. <i>Leverage</i> (DER) c. Komisaris Independen d. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> <i>ROA</i> , <i>Leverage</i> , Komisaris Independen.Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Agresivitas Pajak sedangkan yang menjadi variabel independen adalah *Return on Asset*, *Leverage*, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Pengaruh masing-masing variabel terhadap Agresivitas pajak.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### 2.4. Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1. Pengaruh *Return on Asset* terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memperoleh laba. Semakin tinggi profitabilitas maka agresivitas pajak pada perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan ketika profitabilitas dari sebuah perusahaan tinggi akan menghasilkan laba perusahaan yang tinggi sehingga beban pajak perusahaan juga akan tinggi. Hal ini bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk meminimalkan beban sehingga perusahaan akan melakukan agresivitas pajak agar beban pajak yang dibayarkan rendah.

Teori ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak [6]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H<sub>1</sub> : *Return on Asset* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

#### **2.4.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan bunga pinjaman merupakan pinjaman biaya yang dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Oleh karena bunga atas utang mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin besar jumlah utang akan semakin besar pula keuntungan mengurangi laba kena pajak dan semakin besar agresivitas pajak. Teori ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak [9].

H<sub>2</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

#### **2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan dapat dilihat pada total aktiva perusahaan. Aktiva merupakan manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang akan diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil transaksi masa lalu. Sehingga investor dapat menanamkan modalnya dengan mempertimbangkan besar kecilnya ukuran perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu semakin tinggi total aktiva yang dimiliki perusahaan maka transaksi bisnis yang dilakukan juga semakin kompleks dan hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Teori ini sejalan dengan Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak [6].

H<sub>3</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

#### **2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak**

Komisaris independen berperan sebagai penyeimbang keputusan dewan direksi. Dengan adanya komisaris independen, setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan memberikan hasil yang efektif dan efisien, termasuk dalam kebijakan yang terkait dengan agresivitas pajak sehingga perusahaan akan sulit untuk memanipulasi beban pajaknya.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap perusahaan. Teori ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak [9].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H<sub>4</sub> : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

#### **2.4.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak**

Kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya.

Kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan. dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya pengaruh Kepemilikan Institusional dengan Agresivitas Pajak [14].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H<sub>5</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.